

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akhyar, Zainul, Muhammad Elmy, dan Dedy Ari Nugroho. *Politik Hukum Upah Minimum* (Banyumas: Amerta Media, 2023).
- Almaududi. *Hukum Ketenagakerjaan (Hubungan Kerja) dalam Teori dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2021).
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).
- Azhar, Muhamad. *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016).
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Kansil, C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2018).
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*. (Bandung: CV Mandar Maju, 2011).
- Lalu, Husni dan Zainal Asikin. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004).
- Leback, Karen. *Teori-Teori Keadilan* (Bandung: Nusa Media, 2018).
- Mulyana, Dedy Mulyana. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. (Bandung: Remaja Rosdakarya).

- Organisasi Perburuhan Internasional. *Organisasi Pengusaha yang Efektif*, (Jakarta: Organisasi Perburuhan Internasional, 2006).
- Simanjuntak, Payaman J. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1998).
- Soepomo, Imam. *Pengantar Hukum Perburuhan*. (Jakarta: Djambatan, 2003).
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Depok: Rajawali Pers, 2020).
- Telaumbanua, Dalinama. *Hukum Ketenagakerjaan* (Yogyakarta: Deepublish, 2019).
- Utomo, Laksono. *Hukum Jaminan Sosial*. (Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia).

Jurnal/Artikel Ilmiah

- Ahmad, Rizki. “Implementasi Perhitungan Upah Minimum Kota Semarang Tahun 2023 dalam Kondisi Dualisme Peraturan Pengupahan [Skripsi, Dipublikasikan]” (Universitas Diponegoro, 2024).
- Amanda, Melinda. “Pengaruh Upah dan Insentif terhadap Produktivitas Kerja Karyawan di Medan”. *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 5, No. 2 (Mei, 2024).
- Ambarita, Hendra Halomoan dkk. “Pemenuhan Upah Layak Bagi Pekerja Melalui Penetapan Upah Minimum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,” *Wajah Hukum* 8, No. 1 (4 April 2024).

- Chadijah, Febrianna dan Roy Valiant Salomo. “Analisis Kebijakan Pengupahan pada Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Analisis: Kebijakan Pengupahan Negara Indonesia dan Australia)”. Ministrate (April, 2023).
- Difitri, Annisa Ayu, “Pengaruh Penetapan Kenaikan Upah Minimum Dikaitkan Dengan Upah Sundulan”, Universitas Indonesia (Januari, 2016).
- Fajarwati, Diana. “Kajian Akademis dalam Pertimbangan Penyusunan Upah”. (Universitas Islam “45” Bekasi).
- Faiz, Pan Mohamad. “Teori Keadilan John John Rawls”. Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 1, (Agustus, 2018).
- Fatmala, Dila, Retno Catur Kusuma Dewi, dan Avindo Charima Wardana. “Implikasi Yuridis Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 88C Ayat 1 dan 2 Tentang Upah Minimum Kabupaten Atau Kota Terhadap Dunia Bisnis”, *UNES Law Review*, vol. 5 no. 4 (2023).
- Ginting, Dean Cakra Buana. “Pengaturan Penentuan Upah Minimum Regional Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Prinsip Keadilan dalam Kaitannya dengan Perkembangan Ekonomi Indonesia”, Universitas Indonesia (Agustus, 2021).
- Irfani, Nurfaqih. “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum”, Jurnal Legislasi Indonesia 16.3 (September, 2020).
- Izzati, Nabiyla Risfa. “Tinjauan Penetapan Upah Minimum 2023: Evaluasi Kebijakan Pengupahan dan Revitalisasi Dewan Pengupahan”. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 52 No. 2 (Juli 2, 2023).

- J, Romich, Hill H.D., “*Coupling a federal minimum wage hike with public investments to make work pay and reduce poverty*”, The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences, Volume 4, Number 3, (Februari, 2018).
- Jemarut, Wihelmus, I Gusti Agung Andriani, dan Pahrur Rizal. “Penetapan Upah Minimum dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls”. Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. IV No. 1, (2023).
- Kuma, Ignatius Loyola Julio Doni, Kotan Y. Stefanus, dan Rafael Rape Tupen. “Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengupahan dalam Rangka Penetapan Upah Minimum Tenaga Kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur”, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) (2024).
- M, Alzawahreh, Alhabarneh H.J., AlTayeb A.A., “*Legal Protection for Worker’s Wages in Jordanian Legislation*”, *Studies in Computational Intelligence*, vol. 1152 (2024).
- Rambey, Mara Judan. “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia”, Jurnal *Education and Development*, Vol. 4 No.1 (April, 2018).
- Rohmadhoni, Dian Dharu, “Formulasi Regulasi Upah Minimum Yang Responsif Terhadap Kebutuhan Pekerja/Buruh (Studi Implementasi Regulasi Upah Minimum Di Kabupaten Malang)”, Brawijaya Law Student Journal, (2016).
- Ru’ati, Amien, Garciano Nirahua, Ronny Soplantila. “Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Final dan Mengikat di Indonesia”. Pattimura Legal Journal, Vol. I No. 1 (April, 2022).

- Salim, Patrick Winson dan John Michael Hizkia, “Pengaruh Undang Undang Cipta Kerja Terhadap Pemenuhan Upah Minimum Pekerja,” Jurnal Kewarganegaraan 7, no. 2 (2023).
- Sari, Destya Permata. “Asas Kemanfaatan dan Asas Keadilan dalam Penetapan Upah Minimum”. Legal Spirit, Volume VII No. 7 (Desember, 2023).
- Sari, Destya Permata. “Implementasi Asas Kemanfaatan Dan Asas Keadilan Pada Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan (Studi Kasus Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Surakarta Tahun 2022) [Skripsi, Dipublikasikan]” (Universitas Sebelas Maret, 2023).
- Sari, Septi Wulan. “Pemberian Upah Pekerja Ditinjau dari Upah Minimum Kabupaten dan Hukum Ekonomi Islam”, AHKAM, Vol. 4, No. 1, (Juli, 2016).
- Sarifuddin, Abdul Jamil dan Iwan Erar Joesoef. “Implementasi Keadilan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) Indonesia”. Conference UPNVJ (2023).
- Sulaiman, Eman. “Hukum dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)”. Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 4 No. 2 (Juli, 2018).
- Suryoningprang, M. Bambang, Suradi, dan Sonhaji. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Besaran Upah Minimum di Jawa Tengah Melalui Suatu Analisis Komparasi (Studi Kasus Kota Semarang dan Kabupaten Demak)”. Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, 2016.

Yetniwati, “Pengaturan Upah Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan”, Jurnal Litigasi, Vol. 18 No. 2 (2017).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

Ketetapan Presiden Nomor 107 tentang Dewan Pengupahan.

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 tentang Upah Minimum pada 35 (Tiga Puluh Lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Konvensi ILO Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi.

Konvensi ILO Nomor 98 tentang Hak Berorganisasi dan Berunding.

Website

Heriani, Fitri Novia. “Partai Buruh Apresiasi Putusan MK Terkait UU Ciptaker”. Hukumonline. November 1, 2024.

Munawaroh, Nafiatul. “8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli,” Hukum Online, 16 Februari 2024,

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/>.

Irawan, Atang. “Pakar Hukum Sebut Putusan MK Soal UU Ciptaker Perlu Akselerasi”. Metro TV News (November 21, 2024).

Palau, Emi La. Buruh Tolak PP 51 Tahun 2023 Tentang Pengupahan, Kenaikan Upah Tak Mencukupi Kebutuhan Buruh,” Bandung Bergerak, 16 November 2023, <https://bandungbergerak.id/article/detail/159081/buruh-tolak-pp-51-tahun-2023-tentang-pengupahan-kenaikan-upah-tak-mencukupi-kebutuhan-buruh>.

Portal Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Barat. “Penjelasan Dan Tugas Masing-Masing Bidang”. https://apindojabar.or.id/Front/profil_penjelasan.

Portal CNN Indonesia. “Pengusaha Kecwa dengan Putusan MK soal UU Cipta Kerja”. CNN Indonesia. November 7, 2024.

Portal Databoks, “Pengeluaran per Kapita 2023, Jakarta Punya Standar Hidup Layak Tertinggi”, [https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/6acbd0dfe9f8492/pengeluaran-per-kapita-2023-jakarta-punya-standar-hidup-layak-tertinggi#:~:text=Badan%20Pusat%20Statistik%20\(BPS\)%20melaporkan,juta%20per%20tahun%20pada%202023](https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/6acbd0dfe9f8492/pengeluaran-per-kapita-2023-jakarta-punya-standar-hidup-layak-tertinggi#:~:text=Badan%20Pusat%20Statistik%20(BPS)%20melaporkan,juta%20per%20tahun%20pada%202023).

Portal Kementerian Tenaga Kerja, “Penetapan Upah Minimum Hanya Untuk Pekerja dengan Masa Kerja Kurang dari 1 Tahun”, <https://kemnaker.go.id/news/detail/penetapan-upah-minimum-hanya-untuk-pekerja-dengan-masa-kerja-kurang-dari-1-tahun> .

Portal LBH Semarang, “Upah Murah dan Ketidakpastian Pendapatan Menjerat Buruh dalam Lingkaran Utang”, 2023, <https://lbhsemarang.id/upah-murah-dan-ketidakpastian-pendapatan-menjerat-buruh-dalam-lingkaran-utang/>.

Sedayu, Agung. “Kenaikan UMP Tidak Sebanding Lonjakan Harga Kebutuhan Pokok? Ini Datanya,” Bisnis Tempo, 2023, <https://bisnis.tempo.co/read/1801042/kenaikan-ump-tidak-sebanding-lonjakan-harga-kebutuhan-pokok-ini-datanya>.

Wawancara

Darminto. Wawancara Pribadi. Wakil Ketua DPP APINDO Jawa Tengah.
Semarang: 9 Desember 2024.

Farianto, Willy. Wawancara Pribadi. Anggota Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan (P3HKI). Daring: 24 Desember 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Riset/Penelitian di Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Jawa Tengah (DPP APINDO Jateng)

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS DIPONEGORO FAKULTAS HUKUM	Jalan dr. Antonius Sumarto Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275 Telepon (024) 79918001 Fax (024) 79918206 Laman www.undip.ac.id E-mail info@undip.ac.id
Nomor	: 043UN7.F1/AK/XI/2024	25 NOV 2024
Lamp.	:	
Hal	: Permohonan Riset/Penelitian	
Yth. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Jawa Tengah (DPP APINDO Jateng) Ruko Semarang Indah Blok E II, No. 28 Jl. Madukuro Raya Semarang Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia		
Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan penulisan hukum (skripsi) sesuai dengan kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.		
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:		
nama	:	Prada Azzahra
NIM	:	11000121120047
alamat	:	Jl. Baskoro Raya No. 67, RT. 07/RW. 03, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
nomor HP	:	085601748004
bidang minat	:	Hukum Administrasi Negara
judul skripsi	:	Kebijakan Sistem Pengupahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 Ditinjau dari Aspek Keadilan
Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.		
Dekan,  Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. NIDN 196711191993032002		

**Lampiran 2. Surat Jawaban Instansi Tempat Melaksanakan Riset/Penelitian
di Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Jawa Tengah (DPP APINDO Jateng)**



**DEWAN PIMPINAN ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA
PROVINSI JAWA TENGAH**
The Employers' Association of Indonesia

Nomor : 044/e/DPP/XII/2024
Lamp. : -
Hal : *Jawaban Permohonan Riset/Penelitian*

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro
Di Semarang

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1047/UN7.F1/AK/XI/2024 tertanggal 26 November 2024 tentang Permohonan Riset/Penelitian yang diajukan oleh Mahasiswa :

Nama : Prada Azzahra
NIM : 11000121120047
Bidang Minat : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum
Universita : Universitas Diponegoro
Judul sripsi : Kebijakan Sistem Pengupahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 Ditinjau dari Aspek Keadilan

Bersama ini kami memberikan ijin kepada Mahasiswa tersebut di atas untuk melakukan riset/penelitian di Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Semarang, 18 Desember 2024
DPP APINDO JAWA TENGAH


Frans Kongi
Ketua


Royke Joenar
Sekretaris



Sekretariat :
Ruko Semarang Indah Blok E. 2 No. 28, Jl. Madukoro Raya, Semarang
Telp. (024) 76632990 Fax. (024) 76632989
E-mail : jawatengah@apindo.or.id

**Lampiran 3. Surat Izin Riset/Penelitian Anggota Perkumpulan Pengajar dan
Praktisi Hukum Ketenagakerjaan (P3HKI)**

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS DIPONEGORO FAKULTAS HUKUM	Jalan dr. Antorus Sunyo Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275 Telepon (024) 76918201 Fax (024) 76918206 Laman: www.th.undp.ac.id Pcs-eti: thjat@ve.undp.ac.id
Nomor	: 108 /UN7.F1/AK/XII/2024	
Lamp.	:	
Hal	: Permohonan Riset/Penelitian	24 DEC 2024
 Yth. Dr. Willy Farianto, S.H., M.Hum SOHO Pancoran South Jakarta, North Wing Noble 1102 Jl. M.T Haryono Kav. 2-3, Jakarta, Indonesia		
 Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan penulisan hukum (skripsi) sesuai dengan kurikulum Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.		
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon Saudara berkenan memberikan ijin pelaksanaan penelitian di lingkungan instansi Saudara kepada mahasiswa berikut:		
nama	:	Prada Azzahra
NIM	:	11000121120047
alamat	:	Jl. Baskoro Raya No. 67, RT. 07/RW. 03, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
nomor HP	:	085601748004
bidang minat	:	Hukum Administrasi Negara
judul skripsi	:	Kebijakan Sistem Pengupahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 Ditinjau dari Aspek Keadilan
Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.		
  Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum NIP 196711191993032002		

Lampiran 4. Dokumentasi Pelaksanaan Riset/Penelitian



Wawancara Wakil Ketua DPP Apindo Jawa Tengah di Kantor DPP Apindo Jawa Tengah (9 Desember 2024)



Wawancara Anggota Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan (P3HKK) secara Daring (24 Desember 2024)